

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Kata “persepsi” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* didefinisikan sebagai tanggapan langsung tentang sesuatu atau proses individu untuk mengetahui berbagai hal melalui pancaindra miliknya.¹ Persepsi juga sering disebut sebagai anggapan, gambaran atau pandangan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu.² Oleh karena itu, tindakan seseorang terhadap suatu hal dapat dikatakan sebagai refleksi dari persepsi yang dimilikinya.

Rakhmat mengemukakan bahwa persepsi merupakan pengalaman mengenai peristiwa, objek, dan hubungan-hubungan yang diterima dengan menyimpulkan informasi serta mengartikan pesan yang berupa rangsangan indra. Proses persepsi melibatkan sensasi, atensi, motivasi, ekspektasi, dan memori. Sedangkan, persepsi menurut Kimbal Young yaitu suatu aktivitas merasakan, mengartikan, dan memahami objek yang bersifat fisik maupun sosial.³

Menurut Orgel dan Mozkowitz, persepsi adalah suatu proses dalam diri individu yang terintegrasi dalam menerima stimulus. Persepsi juga dapat dipahami sebagai sebuah pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang telah diindra, sehingga menjadi sesuatu yang berarti.⁴ Persepsi diawali dengan proses penginderaan stimulus menggunakan alat indra seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Setelah diterima oleh alat indra, stimulus akan diorganisasikan serta diinterpretasikan oleh individu sehingga ia menyadari, mengetahui, dan mengerti tentang stimulus tersebut.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses pada 29 November, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

² Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus,” 193.

³ Hadi Suprpto Arifin, dkk., “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang,” *Jurnal Penelitian dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017): 90-91.

⁴ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018), 80.

Dalam kajian Islam, manusia diberi akal oleh Allah untuk mempersepsi sesuatu. Hal tersebut merupakan fungsi khusus dari akal manusia untuk mempersepsi dan menjadi pembeda diantara makhluk Allah yang lain. Akal manusia dapat berpikir tentang keburukan dan kebaikan, kehinaan dan keutamaan, serta kejahatan dan kebenaran. Dengan kemampuan akal tersebut, maka manusia dapat membentuk kesimpulan dari prinsip-prinsip teoritis dan praktis.⁵

Manusia dibekali kemampuan mengindra oleh Allah sebagai salah satu tahapan pengadaan persepsi. Dalam Alquran, pendengaran dan penglihatan merupakan indra yang banyak difirmankan oleh Allah dalam Alquran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan adalah yang penting dalam proses persepsi.⁶ Pendengaran merupakan kemampuan yang diberikan pertama kali oleh Allah kepada manusia sejak dalam kandungan. Sedangkan penglihatan merupakan kemampuan utama manusia yang menjadi salah satu pintu gerbang masuknya stimulus untuk dipersepsi.

Berikut adalah beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang indra manusia:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” (QS. an-Nahl [16]: 78)⁷

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)

Artinya: “Mereka juga berkata: Andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu), tentulah kami tidak termasuk kedalam (golongan) para

⁵ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Kepribadian Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 160.

⁶ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Kepribadian Islam*, 162.

⁷ Alquran, an-Nahl ayat 78, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11--20* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 384.

penghuni (neraka) Sa'ir (yang menyala-nyala).” (QS. al-Mulk [67]: 10).⁸

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُو الْأَلْبَابِ (18)

Artinya: “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).” (QS. az-Zumar [39]: 18).⁹

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْزِقُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رِكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43)

Artinya: “Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung. Maka, Dia menyimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS. an-Nur [24]: 43).¹⁰

⁸ Alquran, al-Mulk ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21--30*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 830.

⁹ Alquran, az-Zumar ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21--30*, 671.

¹⁰ Alquran, an-Nur ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11--20*, 506.

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12)

Artinya: “Biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bungan yang harum baunya.” (QS. ar-Rahman [55]: 12).¹¹

Dari beberapa definisi terkait persepsi di atas, maka persepsi secara umum dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang menerima, memilih, mengatur, dan mengartikan sebuah rangsangan indrawi sehingga menciptakan pengalaman, gambaran, serta perilaku tertentu terhadap suatu hal.

2. Faktor-faktor Persepsi

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kebutuhan psikologis, harapan, kepribadian, pengalaman, penilaian, dan kondisi alat indra. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari keadaan dan situasi lingkungan, sifat atau penampakan luar dari stimulus serta intensitas stimulus.¹²

Menurut Walgito yang dikutip oleh Rofiq, setidaknya terdapat tiga faktor yang berperan dalam persepsi. Faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Alat Indra, Syaraf dan Pusat Susunan Syaraf

Alat indra atau disebut juga dengan reseptor adalah alat yang digunakan untuk menerima rangsangan. Pada alat indra terdapat syaraf-syaraf sensoris yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan kesadaran. Setelah rangsangan dipersepsikan, otak akan memberi respon perilaku melalui syaraf motoris.¹³

b. Perhatian

Untuk mengadakan persepsi dibutuhkan adanya perhatian. Perhatian adalah pemusatan konsentrasi seluruh kegiatan individu yang ditujukan terhadap sekumpulan objek. Perhatian menjadi tahap utama untuk persiapan pengadaan persepsi.¹⁴

¹¹ Alquran, ar-Rahman ayat 12, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21—30*, 783.

¹² Andi Thahir, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2014), 26.

¹³ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, 81.

¹⁴ Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus,” 195.

c. Objek yang Persepsi

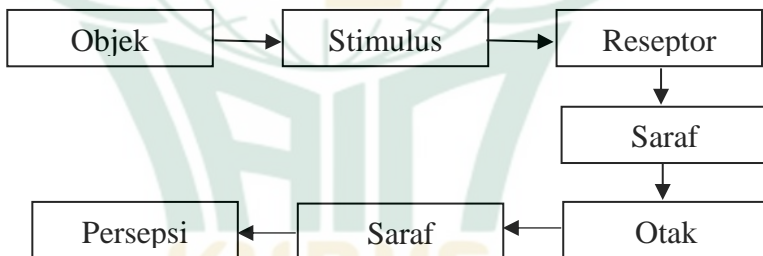
Objek persepsi sangat banyak, yaitu segala hal yang ada di sekitar manusia. Oleh karena itu, secara umum objek persepsi dibedakan menjadi objek persepsi manusia (*person perception* atau *social perception*) dan tidak manusia (*things perception* atau *non-social perception*).¹⁵ Objek persepsi inilah yang akan memberi stimulus luar terhadap alat indra untuk dipersepsikan.

Persepsi yang dihasilkan oleh setiap individu dapat berbeda meski objek yang persepsi sama. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan kondisi dari faktor-faktor persepsi yang dimiliki. Proses pengadaan persepsi terjadi dalam diri individu tetapi pengetahuan, proses belajar, dan pengalaman dapat mempengaruhi persepsi.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Parcek mengungkapkan bahwa proses terjadinya persepsi terdiri dari lima tahapan yang dapat disajikan melalui gambar berikut:¹⁶

Gambar 2.1. Proses Terjadinya Persepsi



a. Tahap Menerima Stimulus

Tahap awal dalam pengadaan persepsi adalah proses menerima rangsangan dari berbagai sumber yang mayoritas ditangkap oleh alat indra. Oleh karena itu, tahap ini juga disebut dengan tahap pengindraan atau sensasi.

b. Tahap Menyeleksi Stimulus

Menurut Michell, persepsi merupakan proses yang di dalamnya memuat sebuah mekanisme untuk menyeleksi

¹⁵ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, 85.

¹⁶ Andi Thahir, *Psikologi Belajar*, 27-29.

sesuatu. Oleh karena itu, rangsangan akan diseleksi setelah diterima oleh alat indra. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson yang menyatakan bahwa ketika sebuah rangkaian rangsangan menjadi menonjol, maka yang lain akan melemah.

c. Tahap Mengorganisasi Stimulus

Tahap pengorganisasian rangsangan berarti stimulus diproses dengan digolongkan dan dikategorikan dengan beragam cara. Tahap ini bertujuan untuk memberi arah dalam mengartikan suatu rangsangan. Proses pengelompokan tersebut dapat terjadi secara rinci dan biasanya individu akan mengelompokkan rangsangan yang kompleks menjadi lebih sederhana.

d. Tahap Mengambil dan Mengecek Keputusan

Menurut Burner, tahap pengambilan keputusan terdiri dari tiga langkah yaitu *pertama* kategori primitif (objek persepsi diamati, diseleksi dan ditandai menurut ciri-ciri tersebut), kedua melakukan pengamatan lingkungan secara cepat untuk menemukan informasi pendukung dalam mencari tanda (*clue search*) agar tepat saat melakukan kategorisasi.

e. Tahap Persepsi Terbentuk

Setelah rangsangan melalui beberapa tahap pengadaan persepsi di atas, maka otak akan mengirim respon atau tanggapan balik berupa pengalaman. Tanggapan itulah yang disebut dengan persepsi.

B. Guru

1. Pengertian Guru

Kata guru dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* didefinisikan sebagai seseorang yang yang memiliki mata pencaharian sebagai pengajar.¹⁷ Definisi guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu tenaga profesional yang memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, menilai hasil belajar, melakukan penelitian, dan mengabdikan untuk masyarakat.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses pada 6 Desember, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁸ Undang-Undang, “20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional,” (8 Juli 2003).

tentang Guru dan Dosen juga mendefinisikan guru sebagai pendidik yang profesional dan memiliki tugas utama untuk melatih, mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, menilai, serta mengevaluasi siswa di pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.¹⁹

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), gurunya disebut guru PAI. Guru PAI adalah guru profesional yang memiliki tugas utama untuk mengajarkan agama Islam kepada siswa agar mudah dipahami dan diamalkan secara tepat oleh para siswa.²⁰

2. Fungsi dan Tugas Guru

Guru merupakan kompetensi penting dalam pendidikan. Guru dapat menjadi kunci sukses pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri apabila melaksanakan peran dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah tugas dan fungsi guru menurut E. Mulyasa:

- a. Sebagai pendidik, guru memiliki tugas untuk mengembangkan potensi dan kepribadian siswa, mewujudkan suasana kondusif dalam pendidikan, serta memberikan teladan bagi para siswa.
- b. Sebagai pengajar, guru memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran.
- c. Sebagai pembimbing, guru memiliki tugas untuk mendukung perkembangan perilaku positif dalam pembelajaran dan membimbing siswa menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran.
- d. Sebagai pelatih, guru memiliki tugas untuk melatih keterampilan penting yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan membiasakan peserta didik agar berperilaku positif dalam kehidupan.
- e. Sebagai pengembang program, guru memiliki tugas untuk membantu pengembangan program pendidikan serta hubungan kerja sama intra sekolah.
- f. Sebagai pengelola program, guru memiliki tugas untuk secara aktif membantu menjalin hubungan serta kerja sama antara sekolah dan masyarakat.

¹⁹ Undang-Undang, "14 Tahun 2005, Guru dan Dosen," (30 Desember 2005).

²⁰ M. Saekan Muchith, "Guru PAI yang Profesional," *Quality* 4, no. 2 (2016):

- g. Sebagai tenaga profesional, guru memiliti tugas untuk melaksanakan usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya.²¹

C. Konsep dan Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Konsep Kebijakan Pendidikan

Konsep adalah simbol atau istilah yang membentuk pengertian tertentu yang perlu dimengerti dan ditaati sebagai sebuah peraturan. Konsep merupakan suatu hal yang bersifat abstrak namun tertuju pada suatu hal yang konkret.²² Sedangkan kebijakan adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga, organisasi, atau instansi pemerintah secara sengaja berdasarkan pemikiran yang terarah dan bijaksana, untuk menyelesaikan masalah serta mendapatkan putusan yang searah dengan tujuan.²³ Kebijakan ada di setiap aspek kehidupan manusia untuk menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan, memecahkan suatu permasalahan, serta membatasi perilaku agar terarah dan jelas. Kebijakan juga berlaku dalam bidang pendidikan, sehingga dinamakan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan merancang tahapan penyelenggaraan pendidikan melalui pemaparan visi dan misi pendidikan untuk meraih tujuan pendidikan dalam waktu tertentu. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan ini timbul karena adanya permasalahan pada proses pelaksanaan dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.²⁴

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat pengajaran dan pendidikan. Pemerintah wajib melaksanakan pendidikan dan memberi kesempatan belajar bagi warga negara. Menurut pasal tersebut juga, pendidikan dapat dipandang sebagai jasa atau barang yang berhak dimiliki publik (umum).²⁵ Oleh karena itu, kebijakan pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai

²¹ Sultho, *Ilmu Pendidikan* (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), 10

²² Gulo W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 5.

²³ Fadiyah Elwijaya, dkk., "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, no. 1 (2021): 58.

²⁴ Fadiyah Elwijaya, dkk., "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," 58.

²⁵ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2014), 8.

kebijakan publik yang khusus mengatur bidang pendidikan dan berkaitan dengan pengadaan, penyerapan, dan penyaluran sumber penyelenggaraan pendidikan.²⁶

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mengikutsertakan manusia, kemampuan organisasional, dan dana untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan Pendidikan merupakan proses pelaksanaan keputusan-keputusan melalui penyediaan dan pelaksanaan sarana pendidikan untuk menciptakan dampak atau tindakan dari individu maupun kelompok yang diarahkan agar mencapai tujuan pendidikan.²⁷ Menurut Grindle, implementasi kebijakan bukan hanya dibatasi oleh mekanisme penjelasan keputusan politis dalam sebuah prosedur melalui jalur birokrasi, akan tetapi berhubungan juga dengan masalah siapa yang memperoleh apa dari sebuah kebijakan, bahkan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang amat penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri.²⁸

Implementasi merupakan proses yang penting bagi suatu kebijakan karena kebijakan pendidikan yang tidak diimplementasikan akan hanya menjadi berkas-berkas yang tersimpan dengan rapi tanpa adanya yang ditimbulkan.

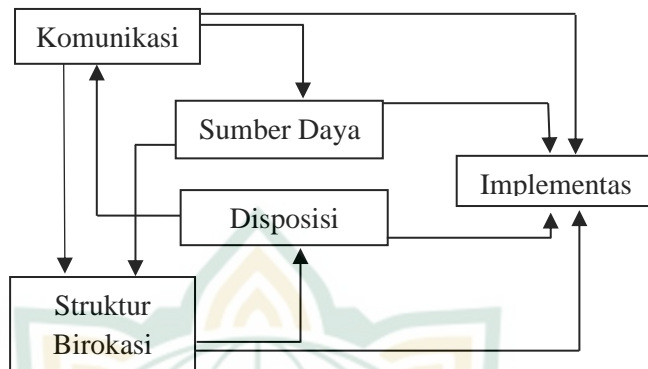
George Edward III menyatakan bahwa implementasi pendidikan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Berikut adalah model implementasi kebijakan menurut George Edward III yang disajikan dalam gambar:²⁹

²⁶ Fadiyah Elwijaya, dkk., "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," 58.

²⁷ Abdal, *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2015), 116.

²⁸ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 132.

²⁹ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 125-128.

Gambar 2.2. Model Implementasi George Edward III**a. Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi terdiri dari beberapa aspek yaitu transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Aspek transformasi informasi mengharuskan informasi disalurkan kepada seluruh pihak yang terkait, misalnya pelaksana, kelompok target, dan pihak pendukung sebuah kebijakan pendidikan. Aspek kejelasan informasi mengharuskan informasi disampaikan dengan jelas untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam interpretasi dari semua pihak. Aspek konsistensi informasi mengharuskan informasi disampaikan dengan konsisten agar tidak membingungkan seluruh pihak terkait kebijakan pendidikan.

b. Sumber Daya

Pelaksana kebijakan pendidikan harus bertanggung jawab dalam proses implementasi dengan cara menyediakan sumber daya agar kebijakan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sumber daya tersebut dapat berupa manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

c. Disposisi

Kecenderungan sikap dan karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam menciptakan implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil mencapai tujuannya. Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan pendidikan yaitu komitmen yang tinggi dan kejujuran. Kedua karakter ini akan membuat pelaksana kebijakan pendidikan

tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.

d. Struktur Birokrasi

Selain tiga faktor di atas, struktur birokrasi juga merupakan faktor yang menimbulkan dampak yang berarti terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan terdiri dari mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme kebijakan pendidikan biasanya berbentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan sebagai petunjuk implementasi agar sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat ringkas agar tidak melemahkan pengawasan dan tidak membuat prosedur birokrasi semakin rumit.

D. Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan baru yang dicetuskan oleh Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim pada 11 Desember 2019. Kebijakan ini terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerapkan konsep pendekatan humanis pada pendidikan, untuk mencapai kemerdekaan dalam proses belajar. Menurut Mendikbudristek Nadiem, kemerdekaan belajar adalah memberi wewenang serta kebebasan kepada lembaga pendidikan dan guru untuk merdeka dari birokratisasi yang rumit, serta memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih dan menentukan bidang serta gaya belajar yang mereka sukai.³⁰

Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah khususnya Kemendikbudristek memiliki cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan, distribusi pendidikan, dan hasil belajar siswa. Cita-cita tersebut dicapai melalui beberapa usaha perbaikan yaitu: *pertama*, proses perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan. *Kedua*, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. *Ketiga*, perbaikan infrastruktur dan teknologi lembaga pendidikan. *Keempat*, perbaikan kepemimpinan, budaya, dan masyarakat.³¹

³⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020), 2.

³¹ Rizal Maula, dkk., *Merdeka Belajar Episode 1-10*, iii.

Sejak penetapan Merdeka Belajar oleh Mendikbudristek Nadiem, hingga tanggal 25 Mei 2020 telah ada sepuluh episode kebijakan yang dirilis. Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar yang ditujukan untuk pendidikan dasar dan menengah menjadi episode awal dari kebijakan pendidikan ini. Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut terdiri dari penggantian Ujian Nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan asesmen mandiri yang dilakukan oleh sekolah, penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang cukup satu halaman, dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) zonasi yang dibuat lebih fleksibel. Berikut adalah pemaparan tentang empat pokok kebijakan Merdeka Belajar:³²

1. Penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter

Gambar 2.3. Penggantian UN dengan AKM dan Survei Karakter

2 Ujian Nasional (UN)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru						
<p>Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung mengaji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran</p> <p>UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu</p> <p>UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa</p> <p>UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya Tahun 2021 UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter <table border="1"> <thead> <tr> <th>Literasi</th> <th>Numerasi</th> <th>Karakter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kemampuan bermitra tentang dari menggunakan bahasa</td> <td>Kemampuan bermitra menggunakan matematika</td> <td>Misalnya pembelajaran, gotong royong, sabornitas, dan perundungan</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS 	Literasi	Numerasi	Karakter	Kemampuan bermitra tentang dari menggunakan bahasa	Kemampuan bermitra menggunakan matematika	Misalnya pembelajaran, gotong royong, sabornitas, dan perundungan
Literasi	Numerasi	Karakter					
Kemampuan bermitra tentang dari menggunakan bahasa	Kemampuan bermitra menggunakan matematika	Misalnya pembelajaran, gotong royong, sabornitas, dan perundungan					

Ujian Nasional (UN) adalah alat ukur berstandar yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan nasional secara terpusat. Namun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang hanya untuk beberapa mata pelajaran saja seperti Bahasa Indonesia dan Matematika, tidak dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang kemajuan potensi siswa sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan. Kemendikbudristek Nadiem juga mengungkapkan

³² Rizal Maula, dkk., *Merdeka Belajar Episode 1-10*, 1-11.

bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dapat menilai kemampuan kognitif dan tidak dapat mengukur karakter siswa.³³

Oleh sebab itu dalam kebijakan Merdeka Belajar, pada tahun 2020 menjadi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terakhir di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021, Ujian Nasional (UN) digantikan dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter, sebagai berikut:

a. Penyederhanaan Asesmen

Standar untuk menilai keberhasilan sistem pendidikan memang tetap diperlukan, tetapi perlu adanya pertimbangan untuk menentukan apa dan siapa saja yang perlu dinilai. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah kompetensi yang benar-benar minimum untuk mempermudah Kemendikbudristek dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi tersebut. Materi dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada aspek kognitif yaitu numerasi dan literasi. Kompetensi literasi numerasi merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan beragam simbol dan angka yang berkaitan dengan matematika dasar sebagai jalan memecahkan masalah nyata pada keseharian siswa. Kompetensi literasi numerasi juga merupakan kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis, menginterpretasi, memprediksi, dan mengambil keputusan melalui informasi yang disajikan dalam beragam bentuk seperti tabel, grafik, bagan, dan lainnya.

b. Survei Karakter

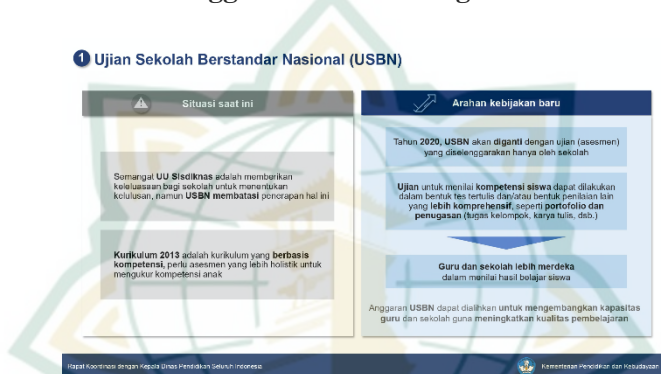
Survei karakter dilakukan Kemendikbudristek untuk mengetahui hal yang tidak dapat dijangkau melalui Ujian Nasional (UN). Hal-hal yang dimaksud diantaranya yaitu ekosistem serta kondisi sekolah. Survei ini juga dilakukan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan toleransi, memang telah dilakukan oleh para siswa atau belum dilakukan. Dengan survei karakter ini diharapkan dapat mengetahui juga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan siswa telah mapan atau belum.

³³ Gefri Hidayat dan Revian Body, "Persepsi Guru-guru SMKN 5 Padang tentang Penghapusan Ujian Nasional (UN)," *Civil Engineering* 2, no. 1 (2021): 363.

Survei karakter akan menjadi standar untuk sekolah, Dinas Pendidikan, hingga Kemendikbudristek dalam melakukan perbaikan agar siswa lebih kuat dan bahagia saat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung di sekolah.

2. Penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Asesmen Mandiri dari Sekolah

Gambar 2.4. Penggantian USBN dengan Asesmen Mandiri



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru akan mengevaluasi siswa dan sekolah akan menilai untuk menentukan kelulusan siswa. Namun, dengan adanya ujian akhir dengan soal-soal pilihan ganda dan berstandar nasional menjadikan para siswa merasa tertekan dan tidak mendapat kemerdekaan dalam belajar. Format ujian akhir berstandar nasional tersebut juga tidak dapat mengetahui hasil capaian belajar siswa, tujuan, dan kompetensi kurikulum 2013. Oleh sebab itu, Merdeka Belajar menyesuaikan inti pendidikan menurut UU Sisdiknas dengan mengganti USBN menjadi asesmen mandiri yang dilakukan oleh sekolah.³⁴

Sekolah masih dapat memakai format USBN pada tahun-tahun yang lalu, tetapi memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan penilaian akhir yang lebih holistik. Penilaian tersebut dapat berupa portofolio, esai, proyek kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat memberi kemerdekaan bagi sekolah dan guru untuk menciptakan dan

³⁴ Rizal Maula, dkk., *Merdeka Belajar Episode 1-10*, 2-3.

menerapkan ide-ide penilaian holistik baru yang dapat menguji serta menilai kompetensi siswa.

3. Penyederhanaan Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Gambar 2.5. Penyederhanaan Format RPP

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

	Situasi saat ini	Arah kebijakan baru
Format	Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara baku	Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
Komponen	RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)	3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat ditulis secara mandiri): <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pembelajaran • Kegiatan pembelajaran • Asesmen 1 halaman cukup
Durasi Penulisan	Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri	Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Halat Komando dan Kepala Dinas Pendidikan Suku Indonesia Kemendikbud dan Kemendikbud

Pada kebijakan pendidikan sebelumnya, format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdiri atas tiga belas komponen yang berat dan padat bagi para guru. Terkadang, kebanyakan waktu para guru dihabiskan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan format yang rumit. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek mengubah format RPP menjadi lebih sederhana, yaitu cukup dengan satu halaman. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) baru ini hanya terdiri dari tiga komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Penyederhanaan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan karena esensi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah proses implementasi dan refleksi dari guru untuk mencapai tujuan pembelajaran³⁵

³⁵ Rizal Maula, dkk., *Merdeka Belajar Episode 1-10*, 7-8.

4. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang Lebih Fleksibel

Gambar 2.6. Sistem PPDB Zonasi Fleksibel

4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

	Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Rancangan Peraturan	<p>Tujuan peraturan PPDB zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuka akses pendidikan berkualitas Mewujudkan TiPusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal <p>Pembagian zonasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur zonasi: minimal 80% Jalur prestasi: maksimal 15% Jalur perpindahan: maksimal 5% 	<p>Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur zonasi: minimal 60% Jalur afirmasi: minimal 15% Jalur perpindahan: maksimal 5% Jalur prestasi (sesanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah Belum diimplementasi dengan lancar di semua daerah Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru

Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek dan Kebudayaan

Merdeka Belajar memiliki tujuan untuk menggaungkan semangat pemerataan pendidikan berkualitas bagi para siswa melalui sistem zonasi. Pemerataan ini juga menyangkut pemerataan kualitas dan kuantitas guru. Oleh karena itu, kebijakan baru memberi kelonggaran untuk sistem zonasi yang dirasa sangat kaku. Sistem zonasi yang sesuai arah kebijakan baru yaitu sekarang jalur prestasi diperbolehkan hingga 30%, kriteria minimum zonasi 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan 5%.³⁶

Arah kebijakan baru ini adalah hasil aspirasi dan kompromi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjadi kesempatan yang bagus bagi para orang tua serta siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang diinginkan. Kemendikbudristek juga meminta bantuan pada Dinas Pendidikan setempat untuk memperbaiki pendistribusian guru bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.

E. Mata Pelajaran Akidah Akhlak

Secara etimologis kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie* yang memiliki arti anak (*paes*) dan membimbing (*ago*). Pendidikan selalu dikaitkan dengan aktivitas bimbingan kepada anak-anak. Zakiyah Drajat mengungkapkan bahwa

³⁶ Rizal Maula, dkk., *Merdeka Belajar Episode 1-10*, 10.

pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan dengan sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rohani dan jasmani terdidik untuk membentuk kepribadian yang utama. Pendapat yang hampir sama diberikan oleh Mohammad Natsirs yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan terhadap rohani dan jasmani untuk mencapai kesempurnaan kemanusiaan yang sesungguhnya.³⁷

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, Marimba mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah proses bimbingan rohani dan jasmani berdasarkan hukum agama Islam yang bertujuan untuk membentuk kepribadian utama seorang Muslim. Pendidikan Agama Islam juga didefinisikan sebagai proses bimbingan yang dilakukan secara terencana dan sadar untuk menyampaikan pemahaman tentang pesan yang dikandung oleh agama Islam secara menyeluruh dan utuh. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan aspek *knowing, doing, dan being*.³⁸

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam menyangkut beragam aspek dan sangat kompleks. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam adalah proses yang berlangsung terus menerus dan tiada hentinya. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam memuat tentang materi Alquran yang bersifat normatif, akidah yang membahas kepercayaan tentang adanya Tuhan, akhlak yang membahas perilaku manusia, Fikih yang membahas norma-norma kehidupan manusia, serta sejarah yang membahas tentang realitas masa lalu.³⁹ Ruang lingkup tersebut juga menjadi kumpulan atau rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada para siswa di sekolah.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah proses membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari siswa menggunakan kinerja kognitif yang berdasar pada kenyataan dan fenomena sosial keagamaan yang bersifat kontekstual. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tiga ciri utama yaitu: (a) Mengikutsertakan proses mental yang maksimal untuk membuat siswa berpikir, (b) Ditujukn untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi berpikir *tingkat* tinggi dari siswa agar mereka dapat

³⁷ Abdullah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Makassar: Alauddin Unirity Pres, 2018), 26-27.

³⁸ M. Saekan Muchith, "Guru PAI yang Profesional," 219-220.

³⁹ M. Saekan Muchith, "Guru PAI yang Profesional," 222.

memproleh serta membangun sendiri pengetahuannya, dan (c) Berbentuk ajaran atau prinsip-prinsip agama Islam yang disampaikan secara kontekstual untuk menyesuaikannya dengan kenyataan fenomena sosial keagamaan dan perkembangan iptek sehingga pemahaman agama dari siswa tidak kaku namun tetap dalam jalur metodologi yang valid.⁴⁰ Hal tersebut dimaksudkan agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi berarti dan bermanfaat bagi kehidupan siswa.

Di sekolah, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) diberikan kepada siswa dengan bentuk pola mata pelajaran yang terdiri dari Akidah Akhlak, Alquran Hadis, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Berikut adalah fokus kajian dari rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah⁴¹:

1. Akidah adalah pokok dari agama yang berhubungan dengan keimanan. Akidah akan memotivasi seseorang untuk berakhlak mulia, taat kepada hukum, dan beramal baik. Sedangkan akhlak dihasilkan oleh akidah dan ilmu. Seseorang yang memiliki akhlak akan berperilaku terpuji dan berusaha mengendalikan diri serta menghindari perilaku tercela. Target utama dari pendidikan akhlak yaitu hati nurani, karena hati nurani merupakan penentu tindakan baik atau buruk seseorang.
2. Alquran Hadis berfokus pada keterampilan membaca dan menulis yang baik, pemahaman arti secara tekstual sekaligus kontekstual, dan pengamalan makna kandungan pada kehidupan keseharian. Mata pelajaran ini juga memiliki fokus untuk menumbuhkan cinta dan penghormatan yang tinggi terhadap Alquran dan hadis sebagai petunjuk hidup.
3. Fikih adalah sistem aturan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Aturan dalam fikih berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar. Fikih berfokus kepada pemahaman dan implementasi ibadah serta muamalah yang benar tentang ketentuan hukum dalam agama Islam dalam konteks ke-Indonesiaan, agar aktivitas keseharian dapat sejalan dengan aturan dan bernilai ibadah.

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama, "183 Tahun 2019, Kurikulum 2013 PAI dan Bahasa Arab," (7 Mei 2019).

⁴¹ Keputusan Menteri Agama, "183 Tahun 2019, Kurikulum 2013 PAI dan Bahasa Arab," (7 Mei 2019).

4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah catatan atau alur perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Mata pelajaran ini berfokus pada kemampuan siswa dalam mengambil hikmah dari masa lalu untuk merespon dan memecahkan permasalahan di masa kini serta masa yang akan datang untuk membangun peradabannya.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Kusuma Pertiwi dan Ririn Pusparini dengan judul “*Vocational High School English Teachers’ Perspective One Merdeka Belajar Curriculum*”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi perspektif guru bahasa Inggris tentang konsep Merdeka Belajar serta penyederhanaan RPP. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket dan wawancara semiterstruktur. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak semua guru memahami konsep dari Merdeka Belajar tetapi mayoritas mendukung adanya kebijakan Merdeka Belajar.⁴² Subjek dari penelitian tersebut adalah guru bahasa Inggris, sedangkan subjek penelitian ini adalah guru runpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Widyastuti dengan judul “*Persepsi Guru tentang Konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 3 Sleman*”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui persepsi dan pelaksanaan guru tentang konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 3 Sleman. Metode yang digunakan dalam tersebut adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya menggunakan *reduction*, *display*, dan *verification*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu para guru memiliki persepsi yang positif tentang Merdeka Belajar, pembuatan RPP dilakukan dengan *workshop* dan peningkatan mutu guru serta pembelajaran aktif dilakukan secara daring dengan teknik pembelajaran interaktif dan

⁴² Anita Kusuma Pertiwi dan Ririn Pusparini, “Vocational Hight School English Teachers’ Perspective On Merdeka Belajar Curriculum,” 1982.

- komunikatif.⁴³ Penelitian tersebut tidak meneliti implikasi penerapan Merdeka Belajar terhadap pembelajaran PAI, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implikasi penerapan Merdeka Belajar terhadap pembelajaran PAI.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati dengan judul “*Persepsi Guru dalam Konsep Pendidikan (Studi pada Penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar)*”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk Mengetahui persepsi guru terhadap penerapan Merdeka Belajar dan faktor penghambat penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar. Penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu persepsi guru terhadap Merdeka Belajar adalah siswa dapat meningkatkan kemampuan dengan implementasi Merdeka Belajar tetapi tetap dengan bimbingan guru dan orang tua. Selain itu, kendala penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar adalah kurangnya pemahaman siswa, guru, dan orang tua.⁴⁴ Penelitian tersebut tidak meneliti implikasi penerapan Merdeka Belajar terhadap pembelajaran PAI, sedangkan penelitian ini meneliti tentang implikasi penerapan Merdeka Belajar terhadap pembelajaran PAI. Selain itu, terdapat perbedaan lagi yaitu, penelitian tersebut menggunakan subjek guru di tingkat SMA, edang penelitian ini menggunakan subjek guru Madrasah Aliyah Negeri.
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Rizal Maulana Rizal dengan judul “*Persepsi Guru terhadap Merdeka Belajar SDN Se-Kecamatan Blimbing Kota Malang*”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan persepsi guru SDN se-kecamatan Blimbing Kota Malang terhadap empat pokok kebijakan Merdeka Belajar. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 69,24% guru telah paham tentang penggantian USBN dengan ujian mandiri oleh sekolah, 54,80% guru sudah paham tentang UN diganti dengan AKM dan survei karakter, 72, 84% guru sudah paham tentang penyederhanaan RPP, dan 72,35% guru sudah paham sistem

⁴³ Atika Widyastuti, “Persepsi Guru tentang Konsep Merdeka Belajar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri 3 Sleman” (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁴⁴ Kasmawati, “Persepsi Guru dalam Konsep Pendidikan (Studi pada Penerapan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Takalar)” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

zonasi yang fleksibel.⁴⁵ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Selain itu, terdapat perbedaan lagi yaitu, penelitian tersebut menggunakan subjek guru di tingkat Sekolah Dasar Negeri, sedang penelitian ini menggunakan subjek guru Madrasah Aliyah Negeri.

G. Kerangka Berpikir

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan baru yang memiliki cita-cita mewujudkan peningkatan angka partisipasi pendidikan, distribusi pendidikan, dan hasil belajar siswa. Cita-cita tersebut dicapai melalui beberapa usaha perbaikan yaitu: *pertama*, proses perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan. *Kedua*, perbaikan kurikulum, pedagodi, dan asesmen. *Ketiga*, perbaikan infrastruktur dan teknologi lembaga pendidikan. *Keempat*, perbaikan kepemimpinan, budaya, dan masyarakat.

Idealnya keempat usaha tersebut dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Namun, perbedaan persepsi guru terhadap Merdeka Belajar setelah dua tahun penetapan masih ditemukan. Hal tersebut dapat menghambat proses pencapaian cita-cita Merdeka Belajar.

Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi guru terhadap konsep Merdeka Belajar. Faktor tersebut yaitu *pertama*, faktor internal yang terdiri dari alat indra, syaraf, susunan syaraf pusat, kebutuhan, harapan, pengalaman, dan penilaian. Faktor *kedua* yaitu objek persepsi, keadaan dan situasi lingkungan serta sifat atau penampakan luar dari stimulus. Persepsi seseorang merupakan cerminan pemikiran yang dimiliki tentang suatu hal. Persepsi seseorang dapat menghasilkan tanggapan berupa sikap atau perilaku terhadap objek yang dipersepsi. Tanggapan dan sikap yang dihasilkan oleh persepsi tersebut akan menimbulkan dampak baik atau buruk terhadap objek yang dipersepsi.

Guru mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai komponen sumber daya manusia dalam bidang pendidikan menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar karena guru merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut. Persepsi guru yang positif terhadap konsep Merdeka Belajar dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang

⁴⁵ Maulana Rizal, "Persepsi Guru terhadap Merdeka Belajar SDN Se-Kecamatan Blimbing Kota Malang" (skripsi, Universitas Negeri Malang, 2021).

tepat sehingga memberi dampak positif terhadap pembelajaran PAI. Selain itu, proses pencapaian cita-cita Merdeka Belajar juga mudah untuk dilakukan. Berikut adalah gambaran tentang kerangka berpikir pada penelitian ini:

Gambar 2.7. Kerangka Berpikir

